

KOLABORATIF PENGELOLAAN CANDI BOROBUDUR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GUNUNG MERAPI

Hendro Pratikno¹, Anwar Kurniadi²

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Bencana

² Dosen Program Studi Magister Manajemen Bencana
Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan,
Komplek IPSC Sentul, Bogor, Indonesia 16810

E-mail : hendropratikno888@gmail.com

E-mail: anwarmoker68@gmail.com

Abstract

Abstract - Mount Merapi is one of the most active volcanoes in Indonesia, which is administratively located in Sleman Regency and Magelang Regency in the Central Java Province. The Borobudur Heritage Conservation Center in Magelang Regency does not yet have a Standard Operating Procedure (SOP) for cleaning the temple from volcanic ash, and not clear who is the responsible for it. If the condition is allowed, it could be a bad impact on the safety and preservation aspects. The purpose of this study was to know how far the collaboration among stakeholder in managing of the Borobudur temple. This study used qualitative research methods with descriptive design. The results showed; 1) dialog among stakeholders didn't find the solution; 2) building trust with making program Twin Villages especially among villages that impacted by Merapi Mount eruption; 3) commitment to made program of structural and non structural mitigation and also preparedness; 4) sharing understanding with making communication and collaboration and synergizing well patterned ; 5) temporary result of the distribution of authority was still not optimal so that it was important to make new official regulation. The conclusion showed the collaboration among stakeholders were still not optimal so it needed to make new official regulation. Recommendation was to among manager stakeholders make it round table to determine new regulation on minister level as well as field level (Standard Operational Procedure/SOP).

Keywords: *Collaboration Management, Borobudur Temple, Disaster Management, Merapi Mount*

Abstrak

Abstrak - Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia yang secara administratif berada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur Kabupaten Magelang belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pembersihan Candi dari abu vulkanis dan belum jelas siapa yang bertanggung jawab. Bila hal ini dibiarkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam aspek keselamatan dan kelestarian bangunan candi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan dan pelestarian Candi Borobudur dari Erupsi Gunung Merapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui hasil kolaborasi antar stakeholder dalam mengelola situs Candi Borobudur. Hasil penelitian tentang upaya-upaya kolaborasi yang telah dilakukan adalah: 1) dialog tatap muka antar stakeholder masih menemui titik temu; 2) membangun kepercayaan dengan membuat program Desa Bersaudara khususnya pada daerah terdampak erupsi Gunung Merapi; 3) komitmen terhadap proses dengan melakukan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural serta kesiapsiagaan; 4) berbagi pemahaman dengan membentuk saluran komunikasi dan kerjasama serta bersinergi yang terpolakan dengan baik antar stakeholders; dan 5) hasil sementara untuk pembagian kewenangan masih belum optimal sehingga penting sekali membuat kebijakan resmi dalam mengelola candi. Kesimpulan menunjukkan bahwa hasil kolaborasi antar stakeholder masih

belum optimal sehingga perlu dilanjutkan dengan pembuatan peraturan resmi dalam pengelolaan Candi Borobudur. Rekomendasi adalah untuk para stakeholder pengelola agar duduk bersama untuk membuat peraturan baik tingkat Menteri maupun SOP untuk yang di lapangan.

Kata Kunci : Pengelolaan Kolaborasi, Candi Borobudur, Penanggulangan Bencana, Gunung Merapi

PENDAHULUAN

Sistem penanggulangan bencana harus mampu dikelola dengan komprehensif dan berkelanjutan. Kemampuan pengelolaan penanggulangan bencana lebih efektif melalui pendekatan kolaboratif. Dengan pendekatan ini mampu mengakomodir setiap komponen dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana, baik SDM, pemangku kepentingan maupun sarana dan pra sarana pendukung. Langkah strategis ini memberikan stimulan kepada pemangku kepentingan bahwa urusan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Dimana pendekatan kolaboratif dengan tiga komponen pentingnya meliputi: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bersama-sama melakukan upaya penanggulangan bencana.

Kolaboratif merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan pemangku kepentingan non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implemetasi kebijakan publik, atau dapat pula berbentuk dalam manajemen program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2007).

Model kolaboratif merupakan perkembangan kebijakan publik yang muncul dengan model sistem

pengelolaan baru menggantikan model manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang lama, serta hadir untuk menyatukan *stakeholders* (publik dan privat) dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Stoker, 2004, p.17).

Perkembangan isu kebencanaan memberikan gambaran bahwa tidak ada negara atau organisasi yang dapat berjalan sendiri. Sehingga diperlukan sikap kolektif melalui tata kelola kolaboratif dengan memperkuat kapasitas individu, komunitas, negara, dan sistem untuk menghadapi risiko dari ancaman dan kerawanan yang ada.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Berdasarkan data *World risk report* 2018, Indonesia menduduki urutan ke-36 dengan indeks risiko 10,36 dari 172 negara paling rawan bencana alam di dunia. Kondisi tersebut disebabkan oleh keberadaan Indonesia secara tektonis yang menjadi tempat bertemunya tiga lempeng tektonik dunia (Eurasia, Indo Australia dan Pasifik), secara vulkanis sebagai jalur gunung api aktif yang dikenal dengan cincin api pasifik atau *Pacific ring of fire*. Kondisi ini kemudian menjadi penyebab terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai risiko bencana cukup tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah mempunyai kategori bencana yang berbeda-beda, yaitu bencana gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor, gelombang tinggi dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan, dan tsunami (Tim BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2016, h.7).

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia yang secara administratif berada di Kabupaten Sleman dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Gunung Merapi ini mempunyai risiko bencana yang tinggi di mana gunung api ini mengalami erupsi setiap dua sampai lima tahun sekali (Nugroho *et al.*, 2014, h.36).

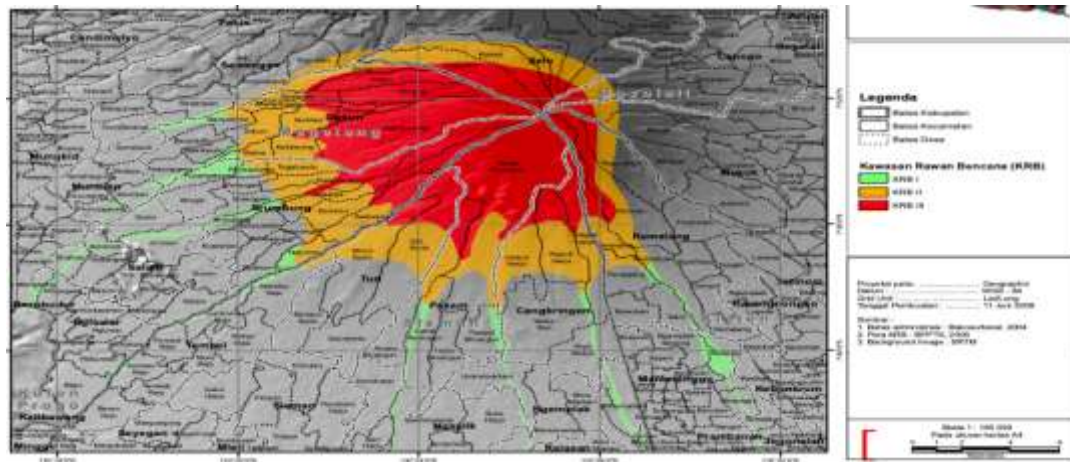
Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 lalu yang merupakan erupsi terbesar dalam 100 tahun menyebabkan total kerugian dan kerusakan mencapai Rp 7,3 triliun (Jibril, 2020). Kerugian yang dialami tidak hanya pada sektor ekonomi, akan tetapi erupsi ini juga menyebabkan 341 orang tewas, 368 orang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan 61.154 orang dievakuasi (Data BNPB, 2011).

Meski risiko bencana yang dihadapi sangat tinggi, masyarakat sekitar termasuk masyarakat Kabupaten Magelang tetap hidup dan bekerja sehari-hari di daerah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Dengan demikian, tingkat kerentanan bencana juga dipengaruhi oleh

masyarakat yang tinggal di sekitar kaki gunung, berjarak 4 km dari puncak gunung. Kota Magelang dan Kota Yogyakarta adalah kota besar yang secara geografis sangat dekat dengan Gunung Merapi, yaitu berjarak kurang dari 30 km dari puncaknya (Nugroho *et al.*, 2014, h.36).

Pada Kawasan Rawan Bencana III tidak diperkenankan untuk hunian tetap dan penggunaan bersifat komersial. KRB II adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, mungkin aliran lava, lontaran batu, guguran, hujan abu lebat, umumnya menempati lereng dan kaki gunung api. Sedangkan KRB I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir. Selama erupsi membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat dan lontaran batu (pijar). Kabupaten Magelang sendiri termasuk ke dalam KRB III dan KRB II yang dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini.

Gambar 1. Peta Kawssan Rawan Bencana Gunung Merapai



Sumber: Geospasial BNPB (2020).

Berdasarkan peta di atas, KRB III merupakan kawasan yang tidak layak digunakan sebagai daerah pemukiman, akan tetapi kawasan ini masih tetap dihuni oleh masyarakat sekitar. Wilayah yang masuk KRB III di Kabupaten Magelang ada 19 desa di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Sawangan. KRB III Gunung Merapi adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlenda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

Intensitas erupsi Gunung Merapi yang relatif sering membuat Kabupaten Magelang harus mempersiapkan semua lapisan masyarakat untuk mengenali ancaman bencana, pengurangan risiko bencana, termasuk di sektor pariwisata. Terlebih lagi Kabupaten Magelang mempunyai salah satu destinasi pariwisata yang juga merupakan peninggalan sejarah, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah kuil nenek moyang yang disebutkan di dalam prasasti Sri Kahulunan 842 M

(Sutopo et al., 2011, h.2). Candi Borobudur merupakan satu dari tempat bersejarah yang masuk ke dalam daftar UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) *World Heritage Sites* (UNESCO, 2020).

Pada erupsi 26 Oktober 2010 silam, Gunung Merapi Meletus kembali secara aliran (elusif) dan bukan ledakan (eksplosif) yang membuat Candi Borobudur tertutup abu vulkanik dengan ketebalan kurang lebih 3 mm (cnnindonesia.com, 2010). Abu vulkanik dan pasir yang menyelimuti Candi Borobudur mengandung senyawa belerang dengan tingkat keasaman yang dapat membahayakan batu andesit yang menjadi penyusun struktur candi (Sutopo et al., 2011, h.5).

Berdasarkan data awal yang didapatkan, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur Kabupaten Magelang belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pembersihan candi dari abu vulkanis, akan tetapi upaya pembersihan tetap dilakukan dengan pertimbangan aspek keselamatan dan kelestarian

bangunan candi. Erupsi Gunung Merapi tidak hanya berdampak pada kelestarian dan keselamatan Candi Borobudur, akan tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Pengelolaan Candi Borobudur dalam upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi belum optimal, berdasarkan hasil pra survey menunjukkan bahwa pengelolaan Candi Borobudur terbagi menjadi tiga zona, yakni zona satu oleh Balai Konservasi Candi dibawah Kemendikbud, zona dua oleh PT. TWC dibawah Kementerian BUMN dan zon tiga oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Dalam upaya membangun kepercayaan antar lembaga belum menunjukkan komitmen yang kuat sehingga berjalan sendiri-sendiri sehingga terlebih masyarakat sekitar kawasan Candi Borobudur jarang sekali dilibatkan pada kegiatan di Kawasan Candi. Kaitannya dengan penanggulangan bencana yakni sistem pengelolaan Candi Borobudur yang

belum optimal dalam kolaborasi antar lembaga maka berdampak pada disharmonis lembaga pengelola dalam menghadapi ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi. Maka penelitian ini menarik dikaji melalui pendekatan kolaboratif. Rumusan penelitian ini yakni : bagaimana proses kolaboratif pengelolaan Candi Borobudur dalam penanggulangan bencana Gunung Merapi? Sehingga tujuan penelitian

ini yakni menganalisis proses kolaboratif pengelolaan Candi Borobudur dalam penanggulangan bencana Gunung Merapi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang terfokus pada eksplorasi dan pemahaman data yang dilakukan secara mendalam (Bandur, 2016, h.18). Untuk menentukan *key informant* dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* agar dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi mengenai suatu penelitian (Moleong, 2000, h. 132). Informan meliputi: Balai Konservasi Candi Borobudur, PT. TWC, BPBD Kabupaten Magelang, Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, dan Tokoh Masyarakat kawasan Candi Borobudur.

Pengumpulan data merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait untuk mengumpulkan informasi yang nantinya digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Creswell, 2014, h.206). Pembuktian apakah penelitian ini merupakan penelitian ilmiah dan juga menguji data yang diperoleh peneliti akan dilakukan melalui pemeriksaan keabsahan data (Sugiyono, 2008, h. 270). Adapun analisis data menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014, h. 33) dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Magelang secara geografis terletak diantara 110°01'51" dan 110°26'58" Bujur

Timur, 7°19'33" dan 7°42'16" Lintang Selatan. Batas administrasi di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten

Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo dan di tengah-tengah berbatasan dengan Kota Magelang. Luas Wilayah Kabupaten Magelang adalah 108.573 Ha (1.085,73 km²).

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Magelang



Sumber : BPBD Kabupaten Magelang

Topografi Kabupaten Magelang yang merupakan daerah datar (1.628 Ha), bergelombang (59.175 Ha), curam (27.686 Ha) dan sangat curam (19.542 Ha), dengan ketinggian wilayah antara 203 - 1.378 m diatas permukaan laut, dan ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan air laut.

Collaborative governance muncul dengan model pemerintahan yang lebih partisipatif, yaitu dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan publik (Kim, 2010, p.4). Kolaborasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan keterkaitan berbagai pihak atau pemangku kepentingan, yang dilakukan secara stabil dan kompleks untuk menghasilkan tata pemerintahan yang berorientasi

konsensus. Pemerintah bersama masyarakat serta mitra publik atau swasta melakukan kegiatan bersama dalam suatu organisasi maupun antar organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Kooiman, 2007, p.98). Proses kolaborasi dalam Ansell and Gash (2007, p.558) dimulai dari dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*), berikut penjelasan hasil dan pembahasan penelitian :

1. Dialog tatap muka

Pada dialog tatap muka kolaborasi dimana pembagian zonasi kewenangan pemeliharaan Candi

Borobudur menjadi tantangan bagi setiap lembaga yang mengelola. Sebab keberadaan Candi secara administratif di Wilayah Kabupaten Magelang dengan lembaga pengelola dari pemerintah pusat yakni Kemendikbud dan Kementerian BUMN. Hal ini menjadi polemik kebijakan yang belum sinkron antar instansi untuk menyatukan pandangan. Sehingga lembaga sangat sulit melakukan tindakan jika kebijakan tersebut tidak sejalan bahkan bertentangan dan akan berdampak pada pelanggaran hukum. Dengan lahirnya badan otonomi Candi Borobudur diharapkan bisa berkontribusi untuk kemajuan lembaga, namun ternyata dilapangan belum terlihat dampak yang signifikan sehingga setiap instansi pengelola candi berjalan sendiri-sendiri (ego sektoral).

Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwa ketika seorang berdialog tentu di dalamnya terdapat komunikasi. Apalagi jika dialog dilakukan secara langsung atau disebut sebagai dialog tatap muka. Dialog tatap muka akan sarat dengan komunikasi verbal. Komunikasi disebut sebagai jantung dari kolaborasi. Dari komunikasi antar banyak pihak yang berperan memungkinkan adanya pemahaman bersama, membangun kepercayaan dan komitmen antar *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian diatas sehingga diperlukan pola komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Candi Borobudur.

Menurut DeLeon & Gallagher (2011, p.27-39) mengemukakan pada dekade terakhir

ini akademisi ramai-ramai membahas pentingnya peranan sektor *non-profit* dan konsep *governance* dalam keterlibatannya pada proses kebijakan publik. Johansson et al (2010, p.371-392) mengemukakan bahwa peran dari negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan publik akan sangat menentukan arah perubahan dari suatu kebijakan. Keterlibatan segenap elemen masyarakat dalam proses kebijakan publik memang diharapkan mampu membawa dampak yang positif bukan hanya bagi penyelenggaraan proses kebijakan, melainkan lebih jauh dari itu demi mencapai kesejahteraan rakyat yang lebih luas lagi. Disamping elemen pengelola Candi Borobudur secara kelembagaan, sangat diharapkan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan Borobudur dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Membangun kepercayaan

Pada perkembangannya banyak lembaga membentuk forum atau komunitas pengurangan risiko bencana yang bertujuan bagaimana masyarakat sadar dan mengerti tindakan yang harus dilakukan jika terjadi bencana sehingga dapat meminimalisir risiko yang ada. Dalam mitigasi perlindungan Candi Borobudur instansi BPBD membuat program “Desa Bersaudara” khususnya yang lebih terdampak pada ancaman erupsi Gunung Merapi. Pada desa lainnya, seperti halnya di Desa Borobudur, Pemerintah Desa membentuk LPBDes yang bertujuan untuk meminimalisir korban akibat bencana.

Membangun kepercayaan sering menjadi aspek yang paling menonjol di awal proses kolaboratif tetapi sangat sulit diciptakan. Dalam proses kolaborasi tidak hanya mementingkan kepercayaan antara pemegang peran, tetapi merupakan titik awal yang umum untuk pemerintahan kolaboratif. Membangun kepercayaan merupakan aspek yang tidak terlepas dari tatap muka dan konflik masa lalu, kedua hal tersebut sangat mempengaruhi dalam membangun kepercayaan agar proses kolaboratif dapat berjalan dengan baik (Ansell dan Gash, 2007).

Dalam membangun kesadaran bencana di wilayah Kabupaten Magelang khususnya disekitar kawasan Candi Borobudur sangat diperlukan inovasi dan edukasi kebencanaan akan pentingnya melindungi situs sejarah dunia Candi Borobudur. Ketersediaan informasi menjadi langkah strategis dalam memberikan pandangan dan saluran komunikasi sebagai upaya kesiapsiagaan lebih dini.

3. Komitmen terhadap proses

Alokasi sumber daya dalam partisipasi perlindungan Candi Borobudur sebagai upaya langkah mitigasi menjadi hal yang wajib dipahami dan dimiliki setiap pemangku kepentingan. Akan tetapi, dinamika di lapangan tidak sejalan dengan pemahaman bersama. Selain itu, PT TWC Borobudur juga melakukan antisipasi dalam menghadapi abu vulkanik baik untuk perawatan candi dan juga untuk wisatawan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan penutup stupa-stupa khusus yang dibuat untuk stupa besar

yang ada di lantai-lantai Candi Borobudur. Akan tetapi untuk jumlah pastinya pihak pengelola belum bisa mengonfirmasi. Khusus untuk wisatawan, pihak TWC menyediakan ribuan masker setiap hari. Masker tersebut mulai disediakan setelah status Gunung Merapi ditingkatkan menjadi waspada. Seperti halnya Desa Borobudur, Pemerintah Desa Dayengan Kecamatan Mertoyudan membentuk forum pengurangan risiko bencana LPBDes.

Komitmen *stakeholders* merupakan aspek penting yang dapat menjelaskan tingkat keberhasilan maupun kegagalan *collaborative governance*. Komitmen yang lemah dari tingkat pusat justru menjadi ancaman kegagalan kolaborasi. Karena komitmen yang dimiliki oleh pemangku kepentingan khususnya dari level pusat akan memiliki kecenderungan terhadap partisipasi aktor lain (*stakeholder non state*). Sehingga komitmen yang besar dari pusat adalah sebagai ujung pangkal dari pembangunan komitmen publik dimana tergali hubungan saling menghormati dan menghargai kepentingan masing-masing aktor (Ansell dan Gash, 2007).

Sementara itu, Huxham, and Vangen. (2000), melakukan penelitian mengenai kepemimpinan dalam pembentukan dan implementasi agenda kolaboratif, dengan melihat peran kepemimpinan melalui media: struktur, proses, dan peserta (*participants*) serta mengamati aktivitas kepemimpinan dalam agenda kolaborasi dalam hal pengelolaan kekuasaan dan pengendalian agenda, perwakilan dan pergerakan anggota organisasi, pemberian semangat dan

pemberdayaan anggota yang memiliki kemampuan mencapai tujuan organisasi. Pada kajian selanjutnya, Vangen, S. and Huxham, C. (2003) mengungkapkan bahwa kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan dan melibatkan para pemangku kepentingan, kemudian menggerakkan mereka agar berpartisipasi dalam suatu proses kolaborasi.

Kegiatan mitigasi non struktural ini dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi. Kemampuan dan kekuatan ini dapat terbentuk dengan adanya mitigasi nonstruktural seperti simulasi dan pelatihan berkala yang terus dilakukan. Menurut data yang didapatkan di lapangan, mitigasi nonstruktural tidak hanya dilakukan dengan simulasi dan pelatihan kepada anggota BPBD Kabupaten Magelang dan pegawai Balai Konservasi Candi Borobudur saja, melainkan juga diberikan kepada masyarakat sekitar.

4. Pemahaman bersama

Kesiapan personel dan logistik baik yang disediakan pemerintah pusat maupun daerah serta relawan sudah sangat siap di posko pengungsian. Informasi aktivitas Gunung Merapi termonitor setiap saat oleh BPPTKG dan Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang dan respon cepat untuk diinformasikan kepada publik. Saluran komunikasi dan kerjasama daerah terjalin dengan baik serta sinergi stakeholders yang terpola dengan baik pada sektor

kebencanaan sehingga kapasitas kajian risiko bencana Gunung Merapi dalam hal ini kemampuan BPBD mampu berkontribusi optimal termasuk informasi yang disiapkan kepada pengelola Candi Borobudur.

Pemahaman bersama dalam proses kolaboratif berarti bahwa para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang akan mereka capai bersama-sama. Yang dimaksudkan pemahaman bersama tersebut adalah seperti misi, landasan dan tujuan, berbagi visi, ideologi, tujuan yang jelas, arah strategis, atau keselarasan nilai-nilai inti. Selain itu pemahaman bersama juga dapat digunakan dalam mendefinisikan atau menyelesaikan masalah yang kemudian dicari solusinya bersama-sama (Ansell dan Gash, 2007).

Definisi pemahaman bersama erat kaitannya dengan pendekatan komunikasi, dimana proses yang membutuhkan adanya dialog, adanya partisipasi, dan pada akhirnya menghasilkan suatu kesepakatan. Proses ini ternyata juga terdapat dari beberapa pendekatan perencanaan yang menggunakan basis komunikasi. Yang dimaksud komunikasi disini adalah adanya upaya membangun pemahaman bersama untuk memecahkan permasalahan perencanaan yang dihadapi. Pendekatan komunikasi telah menjadi bahan pemikiran dalam perencanaan transaktif (Friedman, 1973), perencanaan komunikatif (Sager, 2005; Innes dan Booher, 2000), perencanaan konsensus (Voogd, H. & Woltjer, J, 2007), dan perencanaan kolaboratif. (Healey, 2006; Innes dan Booher, 2000).

5. Hasil Sementara

Partisipasi lembaga lebih cenderung eksklusif tidak terlihat ada satu kesatuan yang menjadi wadah untuk berbagi informasi maupun pandangan. Pembagian kewenangan masih belum optimal dalam kinerjanya serta belum ada kebijakan yang mengatur lembaga otonomi pengelolaan candi. Berdasarkan data di lapangan kesiapan sumber daya belum sepenuhnya terlatih dalam mitigasi bencana, terlebih fokus pada keadaan pasca bencana seperti pembersihan candi. Hal ini akan menghambat tercapainya tujuan yang ingin dicapai yaitu pengurangan risiko bencana.

Bertaina, et al (2006) mengemukakan bahwa prinsip utama yang menjadi persyaratan dalam proses kolaborasi adalah transparansi proses, keragaman dan keterwakilan dari para pemangku kepentingan, dan kemampuan seluruh peserta untuk melakukan pengambilan keputusan. Setelah tujuan proses kolaboratif terbangun, diharapkan diperoleh hasil sementara berupa temuan fakta gabungan dan temuan yang disepakati bersama sebelum akhirnya sampai pada konsensus.

Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi ketika tujuan dan keuntungan kolaborasi relatif nyata dan dapat dirasakan. Keuntungan yang dapat dirasakan dalam jangka menengah merupakan proses penting untuk membangun keberlanjutan dan kesuksesan proses kolaborasi yaitu dengan siklus positif untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

Secara mendasar substansi kelembagaan yang mengelola Candi

Borobudur yang terbagi menjadi tiga zona belum menemukan titik terang harmonisasi kerangka hukum dan kebijakan yang jelas jadi selama ini berjalan sendiri-sendiri (ego sektoral). Alokasi sumber daya belum sepenuhnya optimal dalam manajemen SDM, anggaran maupun sarana dan prasarana, sehingga belum terlihat hasil yang signifikan dari kemampuan personel maupun sumber daya lainnya. Sistem kolaborasi yang dibangun dalam wadah partisipasi lembaga belum terjalin dengan baik, sehingga ada kecenderungan eksklusif kepada pihak luar, disamping itu batas tanggung jawab dan kewenangan lembaga belum terpetakan dengan rinci.

KESIMPULAN

Dari Pembahasan diatas menunjukkan bahwa dialog tatap muka antar stakeholder masih menemui titik temu, bisa membangun kepercayaan pada tingkat desa dengan membuat program Desa Bersaudara, dan sudah ada komitmen terhadap proses dengan melakukan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural serta kesiapsiagaan serta sudah mampu berbagi pemahaman dengan membentuk saluran komunikasi dan kerjasama daerah terjalin dengan baik serta sinergi stakeholders yang terpola dengan baik. Akan tetapi hasil sementara untuk pembagian kewenangan masih belum optimal. Untuk itu kesimpulan dalam penelitian ini adalah hasil kolaborasi antar stakeholder masih belum optimal dan perlu adanya tindak lanjut yang lebih operasional yaitu dengan pembuatan peraturan dan

kebijakan resmi dalam pengelolaan Candi Borobudur secara bersama.

REKOMENDASI

Kepada semua stakeholder Pengelola Candi Borobudur duduk bersama untuk membuat peraturan dan kebijakan baik di tingkat Menteri dalam bentuk peraturan bersama, maupun di tingkat lapangan dalam bentuk SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris and Gash, Alinson. (2007). *Journal of Public Administration Research & Theory, Collaborative governance in Theory and Practice*. Nov.2007. vol. 18 Issue 4, pp 543-571.29p.
- Stoker, Gerry. (2004). *Designing Institutions for Governance in Complex environments : Normative rational choice and cultural institutional theories explored and constracted. Economic and social research council fellowship paper No.1.*
- Tim Penyusun BPBD. (2016). *Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020*. Semarang: BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- Nugroho *et al.*, 2014, h.36. Nugroho, Susilo Ariyadi dan Iwan Rudiarto. (2014). Analisis Tingkat Risiko Erupsi Gunung Merapi Terhadap Pemukiman di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. *Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 12014, hlm. 34-49.*
- Muhammad, Djibril. “Kerugian Akibat Letusan Gunung Merapi Rp7,3T”. Dari <https://republika.co.id/berita/br eaking-news/nusantara/11/01/28/161187-total-kerugian-erupsi-merapi-rp-7-3-t>, diakses pada 22 April 2020.
- Tim Penyusun BNPB. (2011). *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: BNPB.
- Sutopo, Marsis & Hari Setyawan. (2011). *Pembersihan Candi Borobudur dari Abu Vulkanik Erupsi Gunung Merapi, Buku Menyelamatkan Candi Borobudur dari Erupsi Merapi*. Semarang: Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
- UNESCO. (1997). *Unesco.org*. (2020). *Borobudur Temple Compounds*. Dari <https://whc.unesco.org/en/list/592/>, diakses pada tanggal 22 April 2020.
- cnnindonesia.com. (2020). *Abu Gunung Merapi Mulai Terpa Candi Borobudur*. Dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/abu-gunung-merapi-mulai-terpa-candi-borobudur>, diakses pada tanggal 22 April 2020.
- Bandur, Agustinus. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moleong, Lexy. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset:*

- Memilih diantara Lima Pendekatan.* London: Sage Publications Inc.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Miles, M.B., Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.*
- BPBD Kabupaten Magelang
- Kim, Suhnyuk. (2010). Collaborative governance In South Korea : Citizen Participation In Policy Making And Welfare Service Provision. *Vol.34 no.3. Asian Perspektif, p165-190.*
- Kooiman, 2007, p.98). Kooiman, Jan. (2007). *Governing as Governance.* London : SAGE Publication, Inc.
- DeLeon, P. & Gallagher, B.K., (2011). A Contemporary Reading of Advice and Consent. *Policy studies journal, 32 (S1), pp.27-39.*
- Johansson, K.E.V, Ole Elgstro, Ngolia Kimanzu, Jan- Erik Nylund, Reidar Persson, (2010). Trends in Development Aid, Negotiation Processes and NGO Policy Change. *Voluntas, 21, pp.371-92.*
- Huxham, Chris, and Siv Vangen. (2000). Leadership in the Shaping and Implementation of Collaboration Agendas: How Things Happen in a (Not Quite) Joined-Up World”. *Academy of Management Journal 43, 1159–75.*
- Vangen, S. and Huxham, C. (2003). Enacting Leadership for Collaborative Advantage: Dilemmas of Ideology and Pragmatism in the Activities of Partnership Managers. *British Journal of Management 14, 61–76.*
- Friedman, 1973), Friedmann, John. (1973) *Retracking America: A Theory of Transactive Planning.* Garden City. New York: Anchor Press/Doubleday.
- Sager T. (2005). Communicative Planners as Naïve Mandarins of Neo-liberal State?. *European Journal of Spatial Development.*
- Innes dan Booher. (2000). Innes, J.E. and Booher, D.E. (2000). *Collaborative Dialogue as a Policy Making Strategy.* Institute of Urban and Regional Development University of California, Berkeley. IURD Working Paper”. <http://escholarship.org/uc/item/8523r5zt>. Desember 2010.
- Woltjer. (2000). Voogd, H. & Woltjer, J. (2007). “From government to governance: Actor participation in regional planning”. in: G. de Roo & G. Porter (Eds) *Fuzzy Planning: The Role of Actors in a Fuzzy Governance Environment, pp. 67–84* (Aldershot: Ashgate).
- Healey, Patsy. (2006). *Collaborative Planning, Shaping Places in Fragmented Societies.* 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Bertaina, et al (2006) Bertaina, et. al. (2006). *Study for the State Trust Lands Partnership Project of the Sonoran Institute and the Lincoln Institute of Land Policy.* Building Trust:

Lessons From Collaborative
Planning on State Trust Lands.